

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Philip H. Coombs dan Manzoor Ahmed (1985; 13-15), mengungkapkan adanya tiga faktor kritis yang harus diperhatikan dalam pembangunan pedesaan (khususnya pendidikan), yaitu : penduduk, tanah dan kesempatan kerja. Penduduk daerah pedesaan meliputi mayoritas terbesar dari seluruh penduduk di dunia sedang berkembang, dan hampir seluruh penduduk pedesaan itu merupakan peserta potensial bagi pendidikan nonformal, baik jika mereka berkediaman di ladang, di desa atau di kota-kota pasar pedesaan.

Sebagaimana digambarkan oleh kedua tokoh tersebut, bahwa keadaan penduduk Indonesia (hasil sensus 1980) pada umumnya (77,5 %) berada di pedesaan. Walaupun terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota, namun akan tetap bertambah penduduk di pedesaan semakin meningkat. Proyeksi PBB menunjukkan peningkatan menyeluruh jumlah penduduk pedesaan di wilayah-wilayah yang kurang berkembang dari sejumlah 1,91 milyar pada tahun 1970 menjadi 2,62 milyar menjelang tahun 1990. (P.H. Coombs dan Manzoor Ahmed, 1985; 13)

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985 (Lampiran Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR RI, 1988; 1032) tentang jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1985 sebesar 164,0 juta jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun dari tahun 1980-1985 sebesar 2,1 %. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk untuk kurun

waktu 1971-1980, yaitu 2,3 %. Namun laju pertumbuhan 2,1 % masih cukup tinggi, oleh karena itu usaha untuk mempercepat penurunan laju pertumbuhan penduduk melalui penurunan tingkat kelahiran masih terus ditingkatkan. Usaha yang dapat menurunkan tingkat kelahiran secara langsung adalah melalui program keluarga berencana. Sedangkan usaha secara tidak langsung, dilakukan melalui integrasi program kependudukan dan keluarga berencana dengan pelaksanaan pembangunan di pelbagai bidang.

Kecenderungan kependudukan yang berat ini membawa implikasi yang khas berkenaan dengan produksi pertanian, penggunaan tanah dan kesempatan kerja di pedesaan, sehingga pada gilirannya membawa implikasi pula terhadap pendidikan di daerah pedesaan. (Philip H. Coombs & Manzoor Ahmed, 1985; 15)

Berkenaan dengan masalah kependudukan, para ekonom memandang penduduk sebagai potensi atau asset sekaligus sebagai beban atau liabilities. Penduduk akan merupakan potensi, apabila jumlah yang banyak itu dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif. Dengan demikian kontribusinya pada produksi nasional dapat ditingkatkan, dan pada gilirannya tingkat pendapatannya makin tinggi dan meningkat pula konsumsinya. Penduduk akan merupakan beban atau liabilities kalau jumlah, struktur, persebaran dan mutunya demikian rupa, sehingga menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksi yang tidak sepenuhnya dapat ditanggung oleh bagian penduduk yang sudah bekerja secara efektif. Demikian Soetjipto W. dalam

Prisma, tentang pertumbuhan penduduk Indonesia (1988;No3 hal. 16). GBHN memandang jumlah penduduk yang besar adalah sebagai modal dasar, tentunya apabila dibina dan dikerahkan ke usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

Penanganan masalah kependudukan di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah maupun badan-badan swasta. Lembaga atau badan yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam program Keluarga Berencana adalah BKKBN sebagai lembaga non departemen yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program KB secara nasional. Adapun lembaga swasta yang turut menangani salah satu program KB adalah PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia).

Apabila pertumbuhan penduduk untuk tahun 1985-1990 sebesar 2,1 % pertahun, yang berarti laju pertumbuhannya sama atau tetap dari tahun 1980-1985, maka jumlah penduduk pada tahun 1990 akan mencapai 181,2 juta jiwa lebih.

Keadaan tersebut merupakan angka kritis yang perlu mendapat perhatian semua pihak, bukan hanya lembaga pemerintah dan swasta yang bertanggung jawab terhadap masalah kependudukan ini, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Berdasarkan rekapitulasi kegiatan klinik KB bulan Desember 1987 secara nasional mencapai target sasaran 67,1% akseptor. Untuk propinsi Jawa Tengah mencapai 70 % peserta KB aktif dari perkiraan jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) sebesar 4.519. 184 pasangan. Berdasarkan studi peninjauan oleh penulis pada bulan April 1988 di kec.Kroya-Cilacap, jumlah peserta KB aktif mencapai 82% dari PUS 10609

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang mendukung terhadap tinggi rendahnya kesadaran masyarakat, antara lain pengaruh tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal yang pada umumnya masih sangat berperan dan kuat pengaruhnya pada masyarakat pedesaan. Kuatnya pengaruh tokoh masyarakat di pedesaan dalam pembahasan ini, bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan masyarakat pedesaan dengan ciri pola anutan yang akan memperkuat tradisi sentralistik dalam proses pembangunan. Menurut Loekman Soetrisno (Prisma, no.1, 1988; 13-25) bahwa persepsi tersebut secara ad hoc menganggap rakyat pedesaan tidak memiliki pendapat dan aspirasi sendiri di luar pendapat dan aspirasi panutan mereka. Sistem panutan hanya muncul dalam masyarakat karena rakyat tidak diberi kesempatan untuk secara otonom menyelesaikan problematik mereka sendiri. Dengan kata lain sistem panutan adalah akibat dari keterbelakangan, bukan suatu aset kultural seperti yang dilihat negara dan aparatnya.

Akibat keterbelakangan inilah masyarakat pedesaan pada umumnya lebih berorientasi kepada orang yang dianggap sebagai pemimpin yang dipercayainya, sehingga inovasi yang mau disampaikan kepada mereka akan lebih efektif bila disalurkan melalui jalur kepemimpinan atau tokoh masyarakat yang dipercayai tidak akan menjerumuskan mereka.

Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini ingin mengungkap sampai sejauh mana kontribusi tokoh masyarakat terhadap keberhasilan program KB, khususnya di kecamatan

Kroya kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Ada beberapa alasan yang mendorong penelitian ini dilakukan di kecamatan Kroya kabupaten Cilacap Jawa Tengah, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kecamatan Kroya dilihat dari segi demografis, mempunyai penduduk yang pada umumnya hidup bertani, terutama mengolah sawah. Secara potensial, kemampuan dan kemauan masyarakat dalam bertani memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan sebagai asset dalam pengadaan pangan terutama padi.

Potensi tersebut, berkaitan erat dengan masalah-masalah kependudukan pada umumnya, dan program KB pada khususnya, yaitu dalam rangka pengendalian pertambahan penduduk yang semakin meningkat dengan disertai peningkatan produktivitas kemampuan manusianya, dan mempertahankan lahan pertanian yang ada pada khususnya. Demikian pula potensi tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan intensifikasi program pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dengan cara pemanfaatan lahan seoptimal mungkin, sehingga petani dapat bekerja secara efisien dan efektif, yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Untuk dapat meningkatkan pengolahan tanah dan upaya-upaya lain secara intensif agar tercapai produktivitas, maka diperlukan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya lebih banyak melalui berbagai kegiatan pendidikan.

Berbagai kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah yang ada dan dilaksanakan di pedesaan, antara lain melalui media elektronik, yaitu siaran radio dan televisi, media cetak dan media kontak personal. Bentuk-bentuk pendidikan tersebut antara lain : Siaran Pedesaan, Koran Masuk Desa, Perpustakaan Desa, Kelompok Belajar Pendidikan Dasar (KBPD), Kelompok Belajar Usaha, Kelompok Belajar PKK, Kelompok Tani, Karang Taruna, Kelompok Pengajian, dan sebagainya.

Semua jenis pendidikan luar sekolah tersebut, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang keterampilan, pengetahuan maupun sikapnya. Demikian pula program KB yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkualitas, mempunyai bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah yang beraneka ragam. Secara lebih khusus, bentuk pendidikannya lebih berorientasi pada tujuan NKKBS. Pesan-pesan program KB dapat disampaikan melalui kelompok-kelompok belajar misalnya melalui : kelompok belajar PKK, kelompok belajar Akseptor KB, kelompok pengajian, Kelompencapir, dan lain sebagainya.

Dalam rangka membelajarkan masyarakat desa dengan pesan-pesan program KB, tidak terlepas dari peran serta para tokoh masyarakat yang pada umumnya masih sangat berperan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Upaya peningkatan produktivitas diri dari masyarakat, akan menghasilkan tenaga kerja berkualitas tinggi yang ditandai oleh perilaku produktif. Perilaku produktif menurut M Kubr (Prisma no.11, 1986; 18), merupakan hasil dari bekerjanya suatu gabungan yang rumit tetapi jelas wujudnya dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang seperti (a) sikap makarya; (b) pengetahuan dan keterampilan, dan (c) kesempatan atau peluang.

Kontribusi program KB dalam masalah tersebut, selain memberi kesempatan atau peluang yang lebih banyak kepada pasangan usia produktif untuk berkarya secara produktif, juga memberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang usaha. Hal tersebut sesuai dengan isi Panca Karya program BKKBN pada point satu dan dua, yang dapat disimpulkan bahwa pasangan usia subur merupakan sumber daya manusia potensial sebagai penggerak pembangunan dan agar mampu berkarya, bekerja secara nyata yang potensial sebagai sumber daya manusia.

2. Gambaran umum dari segi pembangunan fisik daerah kecamatan Kroya kabupaten Cilacap, dapat dikatakan masih kurang menonjol, walaupun jaringan infrastruktur dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah ini berkaitan erat dengan tingkat pendapatan daerah atau tingkat ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah.

Kondisi tersebut mempunyai kaitan yang erat juga dengan keberhasilan program Keluarga Berencana khususnya,

dalam rangka pengendalian tingkat kelahiran. Meningkatnya angka kelahiran yang disebabkan pasangan usia subur semakin meningkat, dan semakin efektifnya pelayanan kesehatan, berarti penambahan penduduk semakin pesat, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan menetap, sehingga distribusi hasil pertanian (produksi pertanian) yang diperoleh keluarga semakin kecil. Hal tersebut berarti kemampuan masyarakat untuk membangun secara fisik relatif semakin rendah, dan secara umum pendapatan daerah relatif kecil.

Demikian pula semakin meningkatnya angkatan kerja baru dalam bidang pertanian (sebagai pengganti angkatan kerja yang kurang produktif), berarti terjadinya pendistribusian tanah atau lahan pertanian yang semakin sempit. Hal ini mengimplikasikan terjadinya pengalokasian hasil yang semakin kecil, dan terjadinya pelarian pencarian lapangan kerja baru ke kota. Dengan demikian akan mengakibatkan menyurutnya penghasilan daerah.

Apabila hal tersebut tidak ditangani secara terpadu dari berbagai sektor, maka kemungkinannya akan semakin parah. Sebagai salah satu upaya dari satu segi/sektor, penelitian ini akan mempelajari bagaimana kontribusi tokoh masyarakat dalam keterlibatannya terhadap program KB, sebagai upaya dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yang langsung ataupun tidak langsung ikut berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

3. Secara umum dilihat dari segi sosial budaya, masyarakat kecamatan Kroya pada umumnya beragama Islam, dan sebagian besar dari masyarakat masih banyak yang mempunyai sikap

fanatik, baik fanatik terhadap tokoh masyarakat yang mereka anggap mempunyai kewibawaan, maupun fanatik terhadap keyakinannya. Sifat fanatisme ini berpengaruh terhadap cara berfikir dan berperilaku masyarakat, baik dalam kehidupan sosial, budaya maupun agama.

Sifat fanatisme masyarakat banyak dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilai budaya yang ditanamkan dan berkembang menjadi pola perilaku yang membudaya. Penanaman keyakinan dan nilai-nilai budaya masyarakat lebih banyak dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan. Pemilikan kewibawaan dan kekuasaan dapat berupa pemilikan ilmu pengetahuan yang luas, keterampilan tertentu, materi/harta, kekuatan fisik yang melebihi yang lain, kekuasaan yang turun temurun, atau pemilikan status sosial maupun ekonomi yang relatif lebih tinggi dari masyarakat biasa, sehingga dapat meningkatkan status kewibawaannya.

Kewibawaan dan kekuasaan tersebut digunakan sebagai alat untuk membentuk pola perilaku masyarakat sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan ajaran yang diyakininya, sehingga terbentuklah keyakinan dan pola perilaku yang mengidentifikasi diri dan seolah-olah tergantung kepada tokohnya atau orang yang memiliki kewibawaan ataupun kekuasaan tadi.

Sifat fanatisme masyarakat dapat mengembangkan sikap kultus individu dan kelompok. Kultus individu pada masyarakat akan membentuk sikap yang hanya mengakui keunggulan-keunggulan seseorang yang dianggap sebagai pemimpinnya, dan kultus

kelompok akan membentuk sikap masyarakat yang hanya mengakui nilai-nilai dan pola perilaku dari kelompoknya sendiri. Dengan masalah tersebut muncullah peran dan fungsi tokoh masyarakat menjadi sangat penting, di mana segala macam permasalahan baik yang menyangkut masalah-masalah sosial, budaya, agama, ekonomi, kesehatan, politik dan lain sebagainya akan dipulangkan kepada tokoh masyarakat untuk mencari alternatif pemecahan yang dianggap terbaik.

Berkaitan dengan masalah tersebut, peran tokoh masyarakat dalam kehidupan sosial di pedesaan menjadi sangat strategis dan mempunyai pengaruh dalam ikut mengubah atau mengadakan pembaharuan terhadap cara berfikir dan berperilaku masyarakat melalui berbagai upaya pendidikan masyarakat.

Peran yang sangat penting dari tokoh masyarakat ini dapat kita pelajari dari sejarah perjuangan bangsa sejak masa kolonial. Loekman Soetrisno (Prisma, no.1, 1988; 14-15) mengungkapkan bahwa, dengan absennya golongan menengah di daerah pedesaan • timbullah beberapa akibat. Salah satu akibat yang penting adalah masyarakat desa tiada memiliki sumber pembaruan endogin yang dapat mendorong mereka menciptakan pembaruan ke arah sosial-ekonomi yang mandiri. Sebaliknya yang muncul di daerah pedesaan adalah suatu mentalitas baru yang dikatakan oleh Van der Kolf sebagai coolie submissiveness bukan sikap mental peasant ingeniousness yang menurut beliau merupakan ciri khas dari masyarakat pedesaan kita.

Gambaran tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran tokoh masyarakat dalam mendorong terjadinya perubahan baik sosial maupun ekonomi dalam masyarakat kita yang pada umumnya berada di pedesaan yang masih terbelakang.

Tokoh masyarakat yang diakui oleh warganya, biasanya dijadikan pula sebagai teladan dalam cara berfikir dan berperilaku, dan mereka akan patuh terhadap apa yang dikatakan dan diperintahkan. Kebutuhan masyarakat terhadap tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai teladan, merupakan kebutuhan yang esensial dalam mempertahankan integritas masyarakat tersebut. Pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan Pudjiwati Sajogyo (1985; 66) bahwa setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang, yang sekaligus mempertahankan integritas masyarakat itu. Selanjutnya, karena integrasi masyarakat dipertahankan oleh tata tertib sosial yang dijalankan oleh penguasa, maka masyarakat mengakui adanya lapisan-lapisan kekuasaan tersebut, walaupun kenyataan itu merupakan beban yang berat baginya.

4. Program Keluarga Berencana adalah salah satu program pembaharuan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih layak. Program ini diharapkan dapat menjadi kebutuhan masyarakat modern, di mana masyarakat Indonesia sedang menuju ke arah modernisasi kehidupan melalui tahap-tahap pembangunan, dan pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi serta partisipasi aktif masyarakat pada umumnya.

Adanya program KB dari pemerintah yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebutuhan di satu pihak, dan adanya kondisi obyektif masyarakat desa khususnya dalam tingkat kesadaran akan kebutuhan terhadap KB yang masih rendah di lain pihak, maka dalam peluncuran program tersebut diperlukan komunikator yang memiliki kredibilitas sosial dan budaya dalam menyampaikan pesan pembangunan kepada masyarakat sebagai sasaran (subyek pembangunan), sehingga terjadi perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, penambahan keterampilan, dan terjadi perubahan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat pedesaan pada khususnya.

Kondisi obyektif masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki tingkat kesadaran yang relatif rendah karena tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan tingkat kebutuhan akan KB belum merupakan prioritas utama karena tekanan ekonomi sehari-hari yang mereka hadapi, sehingga mereka kurang menyadari adanya hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan besarnya tanggungan dalam keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat N.Daldjoeni (1986; 145) yang mengutarakan bahwa masyarakat desa yang kurang memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan dan komunikasi, dengan penghasilan yang rendah, mereka lebih seret diajak ber KB dibandingkan dengan masyarakat di kota, di mana berfikir rasional dipupuk oleh tantangan hidup setiap hari.

Untuk mengubah keadaan tersebut, diperlukan motivator inovasi yang mampu mengubah cara berfikir dan berperilaku

masyarakat, yang tidak dirasakan sebagai suatu masalah sosial maupun budaya yang menyimpang. Dalam hal ini peran tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal, sangat urgen dan strategis dalam rangka pembaharuan atau pembangunan.

Program KB di desa-desa kecamatan Kroya, merupakan salah satu program pembangunan desa yang berperan sebagai unsur inovasi. Berkaitan dengan hal tersebut, ada berbagai sikap maupun pandangan masyarakat desa terhadap hal-hal yang bersifat baru. Menurut Hassinger yang dikutip oleh Ahman Sya (1988; 4) disebutkan, ada dua sikap yang mungkin terjadi pada masyarakat desa, apabila menghadapi sesuatu inovasi, yaitu sikap "selective exposure" dan "selective perception".

Menurut Ahman Sya, yang dimaksud dengan "selective exposure" adalah sikap menghindari dari unsur inovasi (terutama pesan-pesannya), apabila unsur inovasi tersebut bertentangan dengan predisposisinya (keyakinan agama). Sedangkan "selective perception", yaitu pengaruh yang sangat kecil dari pesan-pesan inovasi yang disodorkan, karena mereka belum membutuhkan inovasi itu, atau penyodorannya bersifat memaksa.

Sikap selective exposure pada masyarakat desa di kecamatan Kroya cenderung masih ada, yang dipengaruhi oleh keyakinan agama maupun budaya. Misalnya tentang konsep "banyak anak banyak rejeki". Demikian pula sikap selective perception sebagaimana diungkapkan oleh Ahman Sya (1988; 5) cenderung terjadi pada masyarakat pedesaan, setelah dilibatkannya faktor politis dalam pelaksanaan program KB, misalnya adanya

sistem target yang dibebankan kepada kepala desa dalam usaha menambah jumlah peserta KB.

Adanya kedua sikap tersebut pada masyarakat pedesaan, memunculkan peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting, apalagi dalam masalah program KB yang masih cukup peka, sehingga perlu pendekatan yang lebih bersifat supportif, persuasif, edukatif, dan partisipatif.

Dengan model-model pendekatan tersebut, dimungkinkan upaya para tokoh masyarakat akan lebih efektif dari pada pendekatan lain yang lebih bersifat politis, direktif, dan kekuasaan (power strategies), dalam meluncurkan program keluarga berencana di pedesaan yang pada umumnya tingkat pendidikannya masih rendah. Untuk itu, tuntutan yang semakin mendasak kepada para tokoh masyarakat adalah kemampuan mengadopsi inovasi sebagai aset dalam mengolah dan memberi bumbu sedemikian rupa yang sesuai dengan selera masyarakat setempat, sehingga strategi implementasi dari program tersebut, akan mulus dan efektif dalam rangka terjadinya difusi inovasi.

Berkaitan dengan masalah tersebut, jika program KB yang merupakan salah satu program kependudukan diimplementasikan di daerah pedesaan, maka intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam memotivasi warganya untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan program KB, adalah sebagai salah satu strategi yang cukup efektif dalam mencapai sasaran program keluarga berencana. Hal ini sesuai dengan peran tokoh sebagai "ing madya mangun karsa".

Setiap tindakan seseorang yang disengaja untuk suatu tujuan tertentu, mengandung implikasi bahwa tindakan tersebut dibarengi dengan tingkat pengetahuannya tentang apa yang akan dilakukannya, memiliki alasan mengapa mereka melakukan, dan sampai berapa jauh keterlibatannya dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat di kecamatan Kroya kabupaten Cilacap dalam kegiatan program KB, maka perlu diketahui kondisi obyektif yang ada tentang sejauhmana keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB, apakah mereka telah memahami tentang program KB, dan apa alasan mereka terlibat dalam program KB ? Dengan demikian diperlukan suatu penelitian khusus yang mempelajari bagaimana hubungan antara intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap program KB, dan alasannya ingin terlibat dalam program Keluarga Berencana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan pada studi tentang bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat terhadap program KB, alasan tokoh ingin terlibat dalam kegiatan program KB, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan, dengan intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program KB.

Hasil studi ini akan mengetahui faktor-faktor mana yang mempunyai hubungan erat dengan intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB, sehingga faktor tersebut dapat dijadikan wahana untuk peningkatan peran dan intensitas keterlibatan tokoh dalam kegiatan program KB.

B. Identifikasi masalah.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dari hasil penelitian yang berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan permasalahan pokok yaitu, tentang keterlibatan tokoh masyarakat terhadap program KB, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masalah kepadatan penduduk kecamatan Kroya, dapat dikatakan telah melebihi angka normal, di mana besarnya penduduk telah mencapai 82891 orang pada tahun 1988, dan akan bertambah lagi pada tahun 1989, sedangkan luas tanah/wilayah kecamatan Kroya hanya 58,83 km², sehingga tingkat kepadatannya mencapai 1409 orang lebih per km².

Masalah tersebut merupakan beban berat bagi suatu masyarakat agraris, karena mempunyai implikasi terhadap masalah daya dukung lingkungan yang semakin mengecil. Menurut Otto Sumarwoto yang dikutip oleh N.Daldjoeni (1986; 92 -93) bahwa dengan semakin meningkatnya kepadatan penduduk, semakin menjadilah eksploitasi kota terhadap desa sehingga kemiskinan makin meraja lela. Ini mendorong para petani membuka daerah pertanian baru yang rentetan masalahnya berupa penggundulan hutan, meningkatnya tanah kritis, lahan banjir, bencana kekeringan dan seterusnya.

Untuk daya dukung lingkungan agraris, menurut Otto Soemarwoto (1985; 185) pada dasarnya tergantung pada persentasi lahan yang dapat dipakai untuk pertanian dan besarnya hasil pertanian persatuan luas dan waktu. Semakin besar per-

sentase lahan yang dapat diolah untuk pertanian, makin besar daya dukung daerah itu. Seorang Geograf Amerika, W. Zelinsky (N. Daldjoeni, 1986; 93) dalam studinya mengkombinasikan dua pendekatan antara bioekologis dan kulturekologis untuk menerangkan padat atau jarangya penduduk suatu wilayah, yaitu ada empat unsur dari geokompleks yang meliputi: penduduk, sumber daya alam, struktur sosial dan teknologi. Faktor-faktor yang menentukan kondisi suatu penduduk adalah : pengaruh langsung dari lingkungan alam terhadap manusia secara jasmani atau rohani, fungsi perekonomian yang bertalian dengan sumber daya alam dan penukaran hasil, fungsi-fungsi lembaga sosial-kultural, pengaruh bencana-bencana alam dan sosial, dan akhirnya keputusan kebijaksanaan tertentu di bidang sosial dan politik.

2. Adanya berbagai upaya pemerintah, khususnya BKKBN dan lembaga-lembaga formal maupun non formal yang terkait dalam rangka meningkatkan suksesnya program KB, terutama dalam menjaring lebih banyak PUS untuk menjadi peserta KB aktif, ternyata masih banyak mengalami hambatan secara psikologis, ekonomis, sosial budaya, pedagogis, dan hambatan kelembagaan yang disebut oleh Zaltman hambatan organisatoris, antara lain kekhawatiran akan kehilangan posisi/pengaruh, kurang pembagian kerja, menggantungkan diri kepada atasan. (Mimbar Pendidikan, 1984, no. 21; 9)

Hambatan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya adalah rasa takut dan enggan menjadi peserta KB aktif, karena adanya dampak negatif dari cara pemasangan alat kontraseptif dan persepsi yang keliru terhadap program KB.

Hambatan-hambatan ekonomis berkaitan erat dengan status ekonomi masyarakat yang pada umumnya rendah, sehingga minat terhadap program KB khususnya kurang antusias, karena tekanan ekonomi yang semakin berat kurang mampu berfikir rasional. Hambatan-hambatan sosial budaya yang dihadapi, berkaitan dengan status sosial yang pada umumnya rendah yang beranggapan bahwa program KB adalah untuk pegawai negeri atau untuk status sosial yang lebih tinggi. Demikian pula adanya berbagai keyakinan yang telah membudaya, sehingga mempengaruhi terhadap pola berfikir dan berperilaku masyarakat desa tentang cara-cara KB yang dianggap menyimpang dari agama, pelayanan KB yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki dan ini bertentangan dengan hukum agama sebab bukan muhrim, serta masih adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki. Sedangkan hambatan pedagogis yang dihadapi oleh masyarakat adalah berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang pada umumnya rendah, dan masih kurangnya memperoleh kesempatan pendidikan yang bersifat nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga formal/pemerintah.

3. Adanya para tokoh masyarakat yang masih belum mengikuti secara aktif dalam program KB, baik sebagai peserta KB aktif maupun sebagai pendukung atau sebagai motivator program KB kepada masyarakat.

Masalah ini tentunya akan memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi peluncuran program KB di pedesaan. Sebab pada umumnya masyarakat desa lebih berorientasi kepada tokoh masyarakat yang dianggap sebagai pelopor pembangunan.

4. Jumlah tenaga teknis yang langsung bertugas di lapangan dan berhadapan dengan masyarakat langsung di kecamatan Kroya berjumlah 5 orang PLKB, sedangkan jumlah desa yang menjadi garapannya ada 14 desa, jumlah PUS pada bulan Maret 1988 ada 10609 pasangan, peserta KB aktif ada 8700 orang, dan peserta KB mandiri masih belum tercatat.

Gambaran tersebut menunjukkan perlunya melibatkan partisipasi dari berbagai unsur masyarakat, baik lembaga formal maupun nonformal dalam menangani program KB secara terpadu.

Dalam pelaksanaan di lapangan, PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dibantu oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di setiap desa satu orang, yang kesemuanya berjumlah 14 orang untuk satu kecamatan. Jumlah ini pun masih nampak terlalu berat, karena tugas mereka selain memberikan pelayanan fasilitas alat-alat KB, menjaring PUS menjadi peserta keluarga berencana aktif, memonitor aktivitas peserta KB, dan masih banyak kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan program KB.

Untuk mampu membina para peserta KB dan menjaring PUS menjadi peserta KB aktif, diperlukan strategi pencapaian dan upaya-upaya pendekatan yang relevan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memanfaatkan tokoh masyarakat setempat yang berperan sebagai "change agent" dan "opinion leader," sehingga pesan-pesan dapat disalurkan melalui komunikasi yang lebih efektif, di mana masyarakat dapat berdialog dengan tokohnya.

Ada beberapa pendapat tentang pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan sebagai teori perubahan sosial dan pembangunan masyarakat. Robert Chin dan Kenneth D. Benne (1972; 234-235) mengajukan tiga bentuk pendekatan dalam perubahan, yaitu : pendekatan rasional-empiris (empirical-rational strategies) yang pada umumnya lebih cocok untuk orang-orang yang berpengetahuan Amerika dan Eropa Barat; pendekatan normatif-re-edukatif, yang didasarkan pada anggapan bahwa setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda yang dipengaruhi oleh norma-norma sosio-kultural masyarakatnya; dan pendekatan penggunaan kekuasaan (power). Sesuai dengan pendekatan tersebut, pendapat Christenson yang dikutip oleh Sudardja Adiwikarta dalam Mimbar Pendidikan (1984, No 2; 10) mengemukakan tiga pendekatan (dalam pembangunan), yaitu : pendekatan edukatif dan reedukatif yang lebih cocok untuk menyadarkan masyarakat terhadap masalah yang dihadapinya; pendekatan paksaan (power) lebih cocok apabila diterapkan untuk masyarakat yang sudah sadar tetapi masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya, dan ; pendekatan "technical assistance", yaitu pendekatan yang cocok untuk masyarakat yang masih kekurangan fasilitas maupun kemampuan dalam melaksanakannya.

Oscar Lewis, yang dikutip oleh Sudardja Adiwikarta dalam Mimbar Pendidikan (1984, no. 2; 10-11) lebih menekankan pada pendekatan kultural, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada perubahan manusianya (sifat mentalnya, sistem nilai budayanya, pengetahuan dan keterampilannya) melalui pendidikan dan latihan yang dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.

Pendekatan tersebut lebih cocok diterapkan pada negara-negara berkembang, dan khususnya di daerah pedesaan. Salah satu upaya pendekatan tersebut, dilakukan dengan melalui pendidikan non formal melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun yang lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi masyarakat pedesaan pada umumnya adalah para tokoh masyarakat. Berbagai kegiatan pendidikan yang sifatnya non formal yang sering melibatkan tokoh masyarakat antara lain :

- a. Pendidikan keagamaan, misalnya melalui pengajian rutin dan ceramah-ceramah keagamaan,
- b. Pendidikan kemasyarakatan, misalnya kegiatan musyawarah desa, pertemuan/rapat RT/RW, atau rapat antar petani,
- c. Pendidikan keterampilan misalnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian, PKK, UPGK, Kejar Usaha,
- d. Pendidikan pengetahuan dasar, misalnya melalui kegiatan Kejar Paket A.

Berbagai kegiatan tersebut sangat memberikan kemungkinan yang lebih luas terhadap partisipasi tokoh masyarakat dalam menyampaikan berbagai program Keluarga Berencana dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Bertolak dari pendekatan-pendekatan tersebut, maka dalam rangka memasyarakatkan program KB sebagai salah satu

alternatif menekan laju pertumbuhan penduduk di pedesaan pada khususnya, lebih cocok dengan menggunakan pendekatan kultural edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah yang dihadapinya, serta memberikan motivasi dan contoh-contoh yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Salah satu contoh nilai-nilai kultural edukatif di masyarakat adalah bentuk kerjasama gotong royong dan keteladanan. Dengan dasar gotong royong dan keteladanan tersebut memunculkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di masyarakat. Keterlibatan seseorang tidak selalu dalam wujud aktivitas fisik, namun dapat berbentuk ide, sikap, motivasi maupun pemberian fasilitas atau dana dalam kegiatan pembangunan tersebut. Demikian pula keteladanan seseorang dapat dilihat dari segi idenya, sikap, perilaku, dan motivasinya terhadap permasalahan atau kegiatan pembangunan pada umumnya.

Keterlibatan dan keteladanan merupakan bentuk aktivitas nyata dalam kehidupan masyarakat yang sangat urgen untuk mencapai perubahan atau tujuan hidup yang lebih layak. Demikian pula tujuan pembangunan masyarakat tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu pembangunan tidak akan berarti, tanpa adanya keterlibatan masyarakatnya.

Tingkat keterlibatan seseorang dalam kegiatan pembangunan, mempunyai kaitan erat dengan tingkat pengetahuan dan keinginannya terlibat dalam kegiatan tersebut.

Tindakan seseorang yang didasari oleh tingkat pengetahuan tertentu mempunyai implikasi bahwa tindakannya mempunyai tujuan yang diinginkannya. Suatu studi yang dilakukan oleh Irvin L. Child tentang perkembangan psikologis di Universitas Yale, menggambarkan adanya dua prinsip penting dari motivasi, yaitu (1) bahwa tindakan seseorang ditentukan oleh pengetahuan dan keinginan, dan (2) tindakan yang sama dapat menimbulkan keinginan yang berbeda, dan tindakan yang berbeda dapat menimbulkan keinginan yang sama. (Krech, Crutchfield dan Ballachey, 1962; 72).

Tingkat pengetahuan seseorang berkaitan dengan seberapa jauh seseorang dapat mengingat atau mengenali kembali terhadap apa yang telah dipelajari atau terhadap informasi yang telah diperoleh sebelumnya, berkaitan dengan kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu hal, berkaitan dengan kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi-situasi baru dan nyata. Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi mengandung kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat dipahami, kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti, dan mengandung kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria intern atau kriteria ekstern atau yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Ada berbagai jenis keinginan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Jenis-jenis keinginan ini dikelompokkan

menjadi lima jenis, yaitu : keinginan yang bersifat psikologis, sosial, ekonomis, keagamaan, dan politis.

Keinginan seseorang melakukan sesuatu merupakan alasan mengapa seseorang tersebut ingin melakukan suatu kegiatan tersebut. Alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu berkaitan erat dengan tingkat pengertian dan pemahamannya terhadap masalah yang akan diperbuat. Dengan demikian alasan juga mempunyai berbagai macam bentuk, yaitu ada alasan yang bersifat psikologis, sosial, ekonomis, agama, dan ada juga yang bersifat politis.

Tanpa mengabaikan jenis alasan yang lainnya, kelima jenis alasan ini merupakan pengelompokkan alasan yang pada umumnya terdapat di pedesaan. Alasan psikologis berkaitan dengan keinginan mencapai kepuasan dan prestasi yang bersifat pribadi. Alasan sosial berkaitan dengan keinginan memperoleh status dan menghindarkan diri dari terkena pengendalian sosial melalui kegiatan sosial. Alasan ekonomis berkaitan dengan keuntungan yang dapat dipetik dari suatu kegiatan baik untuk pribadi maupun kelompok yang berupa materi ataupun jasa. Alasan keagamaan berkaitan dengan ideologi atau prinsip-prinsip yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan hukum dan keyakinan. Alasan politis berkaitan dengan keinginan memperoleh kekuasaan atau mempertahankan dan menjalankan kebijakan pemerintah.

Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan merupakan dua variabel yang erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu masalah, alasan mengapa seseorang

terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, dan erat kaitannya dengan tingkat intensitas keterlibatan seseorang dalam kegiatan tertentu.

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka tokoh masyarakat di pedesaan dalam keterlibatannya dengan kegiatan program KB, sangat erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap masalah KB, berkaitan dengan alasan keinginan terlibat dalam kegiatan program KB, dan erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaannya. Masalah tersebut penting untuk diketahui, mengingat tokoh masyarakat mempunyai peranan sentral dalam kegiatan pembangunan, yaitu sebagai agen perubahan sosial dan sebagai pemuka pendapat yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Bagaimana kecenderungan umum tokoh masyarakat di kecamatan Kroya Kab. Cilacap mengenai : tingkat pengetahuan dan pemahamannya tentang masalah KB, alasan ingin terlibat dalam kegiatan program KB, tingkat pendidikan tokoh masyarakat, jenis pekerjaannya, dan tingkat intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program KB ?

b. Bagaimana signifikansi hubungan antara tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang KB dengan alasan ingin terlibat dalam kegiatan program KB, antara tingkat pengetahuan dan pemahaman dengan tingkat intensitas keterlibatan tokoh dalam kegiatan program KB, dan antara alasan ingin terlibat dengan tingkat intensitas keterlibatan tokoh dalam program KB?

c. Bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh terhadap masalah KB, hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan alasan keinginan terlibat dalam kegiatan program KB, dan hubungannya dengan tingkat intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB ?

d. Bagaimana kecenderungan umum perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang masalah KB, jenis alasan ingin terlibat dalam kegiatan program KB, tingkat intensitas keterlibatan dalam kegiatan program KB, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan, antara tokoh formal dengan tokoh informal ?

C. Variabel-variabel penelitian.

1. Variabel independent, yang terdiri dari :

a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh pada masalah KB, dengan indikatornya skor jawaban yang tepat.

b. Jenis alasan keinginan terlibat dalam kegiatan program KB, dengan indikatornya jumlah skor terbanyak dari pilihannya sebagai kecenderungan umum pilihan tokoh.

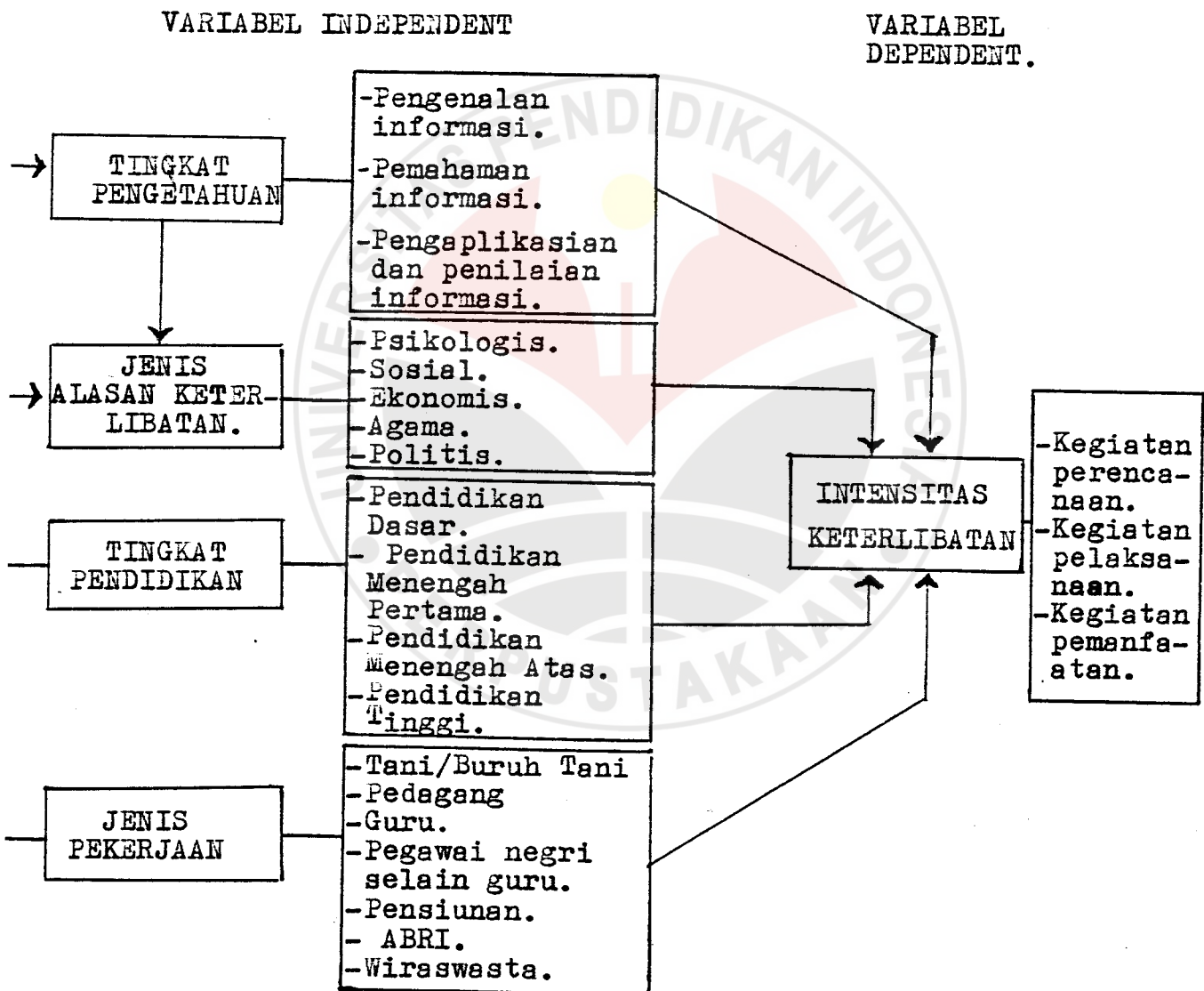
c. Tingkat pendidikan, indikatornya tingkat lulusan atau keluaran dari tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, atau pendidikan tinggi.

d. Jenis pekerjaan, dengan indikatornya jenis kegiatan atau usaha yang bersifat ekonomis dalam menafkahi kehidupan keluarga, yang relatif menetap.

2. Variabel dependent, yaitu tingkat intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB,

dengan indikatornya berupa skor kecenderungan umum dari beberapa alternatif jawaban, yaitu apakah keterlibatannya dalam program KB itu sangat sering (SS), sering (S), jarang (Jr), atau tidak pernah (TP).

Hubungan kedua variabel tersebut di atas dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 1. Skema hubungan antara variabel independent dengan dependent.

Skema tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel independent dengan dependent, yaitu berapa besar signifikansi hubungan antara variabel tingkat pengetahuan, jenis alasan keterlibatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, dengan variabel intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB. Demikian pula skema tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan dan pemahaman dengan alasan ingin terlibat, antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman, dan dengan alasan keingintertarikan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB.

Dengan demikian akan diketahui faktor mana yang berkontribusi terhadap intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB di Kec. Kroya, Kab. Cilacap.

D. Definisi operasional.

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara spesifik dan operasional, sehingga dapat mengurangi ambiguitas pengertian. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hubungan, menurut Harvey Wallerstein (1977;20) adalah berkenaan dengan ide-ide, cara-cara, dan tindakan-tindakan yang dikaitkan dalam cara tertentu untuk menentukan keterkaitannya dalam berfikir atau bertindak dari individu, atau proses menetapkan keterkaitannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, hubungan dapat diartikan sebagai cara mengaitkan antara dua hal dengan teknik (cara) tertentu (yaitu tehnik statistik), untuk menentukan signifikansi keterkaitannya.

Dengan demikian, istilah hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan statistika antara dua variabel atau lebih yang disebut asosiasi. Menurut Sujana (1986; 275) bahwa asosiasi atau hubungan atau kaitan antar faktor adalah mempelajari tentang terdapat atau tidaknya suatu kaitan di antara faktor-faktor. Jika ternyata tidak terdapat kaitan antara faktor-faktor, biasa dikatakan bahwa faktor-faktor itu bersifat independen atau bebas.

Hubungan statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan antara dua faktor dalam daftar Kontingensi B x K, sebagai teknik tes independen antara dua faktor.

2. Faktor-faktor, menurut Sudjana (1975; 282) adalah data-data hasil pengamatan yang digolongkan.

Bruce W. Tuckman (1978; 262) menjelaskan istilah variabel yang disamakan dengan faktor. Istilah variabel-variabel disebut faktor-faktor, dan bagian-bagiannya disebut tingkatan-tingkatan. Dalam penelitian ini, faktor-faktor dibataskan sebagai variabel-variabel yang telah digolongkan untuk dipelajari keterkaitannya.

Variabel-variabel digolongkan menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel stimulus atau input, yang salah satu fungsinya mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen sebagai variabel respon atau output yang diteliti dan diukur untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen.

Variabel independent dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pengetahuan dan pemahaman, alasan ingin terlibat, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan tokoh masyarakat. Sedangkan variabel dependennya adalah intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program Keluarga Berencana.

3. Pengetahuan dan pemahaman, diartikan sebagai kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari atau yang telah diperoleh, dan kemampuan menangkap makna atau arti dari sesuatu hal yang dihadapi.

Kedua kemampuan tersebut merupakan bagian dari tingkatan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kesanggupan intelektual untuk mengenal lingkungannya (baik lingkungan fisik maupun non fisik). Krech dan kawan-kawan (1962; 17) membetaskan kognitif sebagai respon-respon individu terhadap orang dan hal-hal yang dibentuk melalui cara mereka memandang terhadap orang-orang dan hal-hal tersebut.

Kawasan kognitif menurut B. Bloom dan kawan-kawan, dibagi menjadi enam macam kemampuan yang disusun secara hierarkhis, dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks, yaitu sebagai berikut :

a. Pengetahuan (knowledge), yaitu kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari atau diperoleh,

b. Pemahaman, yaitu kemampuan menangkap makna atau arti sesuatu hal yang dihadapi,

c. Penerapan, yaitu kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi baru dan nyata.

d. Analisis, yaitu kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat dipahami;

e. Sintesis, yaitu kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan yang berarti;

f. Penilaian, yaitu kemampuan memberikan harga sesuatu hal berdasarkan kriteria intern atau kelompok atau kriteria ekstern atau yang ditetapkan terlebih dahulu.

Kedua kemampuan tersebut (pengetahuan dan pemahaman), digunakan untuk mengukur apakah para tokoh masyarakat di kecamatan Kroya telah mengerti dan memahami terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah keluarga berencana. Adapun hal-hal yang ditanyakan adalah berkaitan dengan:

- 1). Arti/maksud program keluarga berencana,
- 2). Tujuan dari program keluarga berencana,
- 3). Alat dan metode keluarga berencana, dan
- 4). Pelaksana program keluarga berencana.

4. Alasan, diartikan sebagai pernyataan atau respon individu atau kelompok terhadap suatu hal, yang dinyatakan dalam bentuk lisan atau tulisan atau tindakan, yang bertujuan menginginkan atau menolak sesuatu.

Batasan tersebut menunjukkan bahwa alasan mempunyai ciri-ciri adanya respon terhadap sesuatu yang dihadapi, cara merespon yang dilakukan dengan tindakan baik berupa lisan, tulisan ataupun dengan perbuatan, dan mempunyai tujuan dalam bentuk keinginan ataupun penolakan.

Ada berbagai alasan yang dapat dinyatakan oleh seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Untuk mengetahui kecenderungan alasan yang dinyatakan oleh seseorang, dalam penelitian ini akan dikelompokkan menjadi lima jenis alasan, yaitu : alasan yang bersifat psikologis, alasan yang bersifat sosial, alasan yang bersifat ekonomis, alasan keagamaan, dan alasan yang bersifat politis.

5. Tingkat pendidikan, diartikan sebagai suatu jenjang pengalaman belajar yang diukur berdasarkan struktur pendidikan formal.

Perjenjangan dalam pendidikan formal dibagi menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas. Dengan demikian variabel pendidikan mempunyai indikator-indikator jenjang pendidikan yang pernah ditempuh atau tamat atau lulusan yang sederajat dengan tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah pertama, tingkat pendidikan menengah atas, atau setingkat pendidikan tinggi (Institut, Universitas, Sekolah Tinggi, atau Akademi).

6. Jenis pekerjaan, diartikan sebagai bentuk-bentuk kegiatan manusia yang merupakan upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghasilkan sesuatu hasil tertentu. Dengan demikian, jenis pekerjaan merupakan bentuk produktivitas sumber daya manusia. Bentuk produktivitas mempunyai aneka ragam bidang usaha yang dapat dilakukan manusia. Bidang-bidang usaha tersebut antara lain: pertanian, perdagangan,

pendidikan, perburuhan, hankam, dan lain sebagainya.

Indikator-indikator jenis pekerjaan yang diteliti yaitu : Tani/Buruh tani, berdagang, wiraswasta, guru, ABRI, pegawai negeri non guru, pegawai swasta, pensiunan.

Dengan demikian jenis pekerjaan dalam penelitian ini dibatasi dengan bidang usaha yang dilakukan seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang relatif menetap.

7. Intensitas, mempunyai dua dimensi pengertian, yaitu dimensi kualitas dan dimensi kuantitas. Webster dalam New International Dictionary (1966; 1175), mengartikan intensitas sebagai kualitas dari suatu kondisi atau derajat kualitas atau kondisi atau pengalaman. Harvey Wallerstein (1977; 142) lebih menekankan pada aspek kuantitatif dari intensitas. Demikian pula R. Hilgard (1957; 581) mengartikan intensitas sebagai suatu dimensi pengalaman indera, yaitu suatu pengukuran kuantitatif tentang kekuatan atau derajat sesuatu keadaan.

Dalam penelitian ini, intensitas diartikan sebagai derajat dari frekuensi keterlibatan individu terhadap suatu kegiatan. Pengukuran terhadap derajat frekuensi keterlibatan tersebut digunakan instrument jawaban berskala (Scaled Response), yaitu jawaban dari Sangat Sering (SS), Sering (S), Jarang (Jr), sampai dengan Tidak Pernah (TP).

8. Keterlibatan, diartikan sebagai bentuk aktivitas seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan tertentu di masyarakat, baik berupa ide, tenaga, atau materi.

Keterlibatan sebagai salah satu bentuk partisipasi

mempunyai dua segi, yaitu segi eksternal dan internal. Sebagaimana E. Jayaatmaja dalam Prisma no.8 (1987; 67-68) menyatakan bahwa partisipasi eksternal lebih berkaitan dengan bentuk kegiatan yang terarah pada obyek, sedangkan partisipasi internal lebih berorientasi pada subyeknya.

Noeng Muhadjir (1983;31) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam pembangunan ada tiga tahap, yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Bila orang memahami maksud dan skope suatu inovasi, partisipasinya akan meningkat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka keterlibatan diartikan sebagai bentuk-bentuk kegiatan yang diikuti oleh individu atau kelompok dalam suatu program kegiatan tertentu di masyarakat. Dalam penelitian ini, bentuk-bentuk kegiatan di masyarakat yang dipelajari adalah program Keluarga Berencana di kecamatan Kroya, Kab. Cilacap, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program KB di masyarakat.

Bentuk-bentuk kegiatan dalam perencanaan program KB, meliputi : a). Penyusunan program, b). Penyusunan anggaran biaya kegiatan program KB, c). Pembagian tugas dan tanggung jawab kerja, d). Penyusunan jadwal kerja, e). Pengambilan keputusan tentang kebijakan program KB.

Kegiatan-kegiatan dalam tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a). Pemberian penerangan atau informasi, b). Membentuk dan memimpin kelompok kerja, c). Memberikan pelayanan kesehatan, d). Memberikan layanan bimbingan dan penyuluhan program Keluarga Berencana, dan e). Memberikan layanan fasilitas Keluarga Berencana.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan pemanfaatan program KB di masyarakat, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a). Membentuk kelompok NKKBS, b). Kegiatan berorganisasi, c). Sebagai peserta KB aktif, dan d). Kegiatan dalam pendidikan non formal di masyarakat.

9. Tokoh masyarakat, diartikan sebagai orang yang diskui kepemimpinannya oleh masyarakatnya, baik yang diperoleh melalui legalitas formal maupun informal. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan memberikan pengaruh kepada orang lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu.

Dengan demikian tokoh masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya pengakuan dari pihak lain tentang kepemimpinannya dalam suatu hal,
- b. Pengakuan itu dapat bersifat legalitas formal (karena jabatannya di pemerintahan) atau legalitas informal (karena kemampuannya dalam bidang tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain).
- c. Mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bertindak.

Batasan tersebut di atas didasarkan pada pendapat Everett M. Rogers dan F.Floyd Shoemaker yang disarikan oleh Abdillah Hanafi (1981; 110-111) yaitu bahwa di dalam suatu masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu. Mereka ini seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu. Mungkin mereka itu

menduduki jabatan formal, tetapi pengaruh itu berlaku secara informal; pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi kepemimpinan mereka itu bukan diperoleh karena jabatan resminya, melainkan karena kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain seperti itu disebut tokoh masyarakat, pemuka pendapat, pemimpin informal atau sebutan lainnya yang senada. Sedangkan kepemimpinan pendapat (opinion leadership) adalah tingkat kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain secara informal relatif sering.

Everett M. Rogers (1983) mengungkapkan adanya dua tipe kepemimpinan, yaitu yang disebut opinion leadership dan change agent. Opinion leadership adalah tipe kepemimpinan informal yang mampu mempengaruhi pendapat orang lain tentang inovasi. Opinion leadership (diartikan sebagai pemuka pendapat) adalah mempunyai peranan penting dalam menentukan banyaknya adopsi inovasi dalam suatu sistem sosial.

Change agent, adalah seorang individu yang mempengaruhi keputusan inovasi seseorang dengan mengarahkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak/lembaga pengubah (change agency). Selanjutnya EM.Rogers (1983;313) menjelaskan bahwa change agent mempunyai tugas mengadakan hubungan antara sistem sumber (pihak change agency) dengan sistem yang ada pada sasaran (klien). Peranan utama dari change agent adalah memberikan kemudahan arus inovasi dari change agency kepada suatu kelompok sasaran (klien).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan tokoh masyarakat dalam penelitian ini adalah tokoh formal dan tokoh informal. Tokoh formal yaitu orang-orang yang secara formal mempunyai kedudukan/jabatan dalam pemerintahan, dan secara langsung mempunyai tanggung jawab dalam keberhasilan program KB. Kelompok tokoh masyarakat formal ini dapat disebut sebagai Change agent. Tokoh informal yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain secara informal tentang program KB, sebagai contoh Kyai, Ustadz, guru-guru, dan sejenis tokoh lainnya. Kelompok tokoh informal ini disebut dengan pemuka pendapat atau kepemimpinan pendapat (opinion leadership).

Dengan demikian pengertian judul penelitian ini secara operasional, adalah hal-hal atau unsur-unsur sumbangan apa saja yang mempunyai keterkaitan statistis yang signifikan dengan derajat frekuensi aktivitas yang diikuti oleh tokoh masyarakat dalam kegiatan program Keluarga Berencana di kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Adapun unsur-unsur atau hal-hal yang diasumsikan mempunyai hubungan statistis dengan intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB pada penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman, alasan ingin terlibat, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.

E. Tujuan penelitian.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang faktual tentang intensitas keterlibatan tokoh masyarakat, baik formal maupun informal, dalam kegiatan memasyarakatkan program KB di kecamatan Kroys, kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kependudukan. Intensitas keterlibatan tersebut diasumsikan mempunyai kaitan erat dengan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan peran sebagai tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB. Dengan demikian penelitian ini juga akan menggambarkan tentang faktor-faktor apakah yang berkaitan erat dengan intensitas keterlibatan tokoh masyarakat tersebut.

Secara lebih khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menganalisis tentang data-data sebagai berikut :

- a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat mengenai program KB.
- b. Alasan tokoh masyarakat ingin terlibat dalam kegiatan program KB.
- c. Intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB.

2. Menafsirkan dan menganalisis data hasil pengolahan tentang :

- a. Signifikansi hubungan dan besarnya kontribusi

antara faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh terhadap program KB dengan alasannya ingin terlibat dalam kegiatan program KB, antara tingkat pengetahuan dan pemahaman dengan intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program KB, dan antara alasan ingin terlibat dengan intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program KB.

- b. Signifikansi hubungan dan besarnya kontribusi antara tingkat pendidikan tokoh masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap program KB, antara tingkat pendidikan tokoh dengan alasannya ingin terlibat dalam kegiatan program KB, antara tingkat pendidikan tokoh dengan intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program KB, dan : antara jenis pekerjaan tokoh masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap program KB, antara jenis pekerjaan tokoh dengan alasannya ingin terlibat dalam kegiatan program KB, dan antara jenis pekerjaan tokoh masyarakat dengan intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program Keluarga Berencana (KB).

